

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) maka akan semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Saat ini, SDM lebih menonjol dibandingkan modal fisik dalam proses pembangunan ekonomi. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi keluarga.

Pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan pilihan bagi manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat dipersentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan dipersentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, sementara dimensi kehidupan layak dipersentasikan oleh indikator kemampuan daya beli<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Novita Dewi, *Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*, JOM Fekon, Vol 4. No.1 Februari 2017, h. 870

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing<sup>2</sup>.

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli)<sup>3</sup>

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja

---

<sup>2</sup> Hadi Sasana, *Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah*, Media Ekonomi dan Manajemen Vol 25. No 27 Januari 2016, h. 3

<sup>3</sup> Sal Diba Susen Pake DKK, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 18 No. 04 2018, h.

yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru. Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya<sup>4</sup>.

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan yaitu keberhasilan manusianya. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan, sebab tanpa sumber daya yang berkualitas, sulit untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan dalam pembangunan Negeri ini<sup>5</sup>. Angka harapan hidup adalah perkiraan tingkat usia rata-rata yang akan dicapai oleh penduduk dalam periode waktu tertentu. Semakin baik kondisi perekonomian dan pelayanan kesehatan di suatu negara maka akan semakin tinggi pula angka harapan hidup masyarakat di negara tersebut. Indeks pendidikan menggabungkan dua indikator utama, yaitu rata-rata lama bersekolah dan tingkat melek huruf. Semakin tinggi nilai kedua indikator ini maka akan semakin baik pula nilai indeks pendidikannya. Sedangkan indeks daya beli merujuk pada

---

<sup>4</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan*,..., h. 134

<sup>5</sup> Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan* (Malang: UB Press, 2011), h. 109

standar hidup layak di suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan berapa sesungguhnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka mampu menjalankan kehidupan ini secara layak<sup>6</sup>. Keberhasilan pembangunan kabupaten/kota sangat bergantung pada SDM, khususnya kompetensi<sup>7</sup>. Secara keseluruhan tingkat pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten menurut kabupaten dan kota selama periode 2014-2018 menunjukan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang penulis peroleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.

**Tabel 1.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Provinsi Banten**  
**pertahun periode 2014-2018**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	Menurut Kabupaten/Kota				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Pandeglang	62.06	62.72	63.4	63.82	64.34
Kab Lebak	61.64	62.03	62.78	62.95	63.37
Kab Tangerang	69.57	70.05	70.44	70.97	71.59
Kab Serang	63.97	64.61	65.12	65.6	65.93
Kota Tangerang	75.87	76.08	76.81	77.01	77.92
Kota Cilegon	71.57	71.81	72.04	72.29	72.65

<sup>6</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 147

<sup>7</sup> Ernadi Syaodih, *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 65

Kota Serang	70.26	70.51	71.09	71.31	71.68
Kota Tangerang Selatan	79.17	79.38	80.11	80.84	81.17
Provinsi Banten	69.89	70.27	70.96	71.42	71.95

Sumber: BPS Provinsi Banten

Diakses pada tanggal 11 November 2019, pukul 10.00

WIB

Secara umum, IPM di Provinsi Banten setiap tahunnya terus mengalami kenaikan sejak menjadi daerah otonom. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan sebagai pendapatan per kapita diyakini mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Setiap orang diharapkan mampu memenuhi semua kebutuhan dan mencukupi setiap keinginan tanpa adanya penggunaan kekuatan untuk bertarung. Peningkatan kesejahteraan secara empiris terkait dengan semakin tingginya standar hidup dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Sebaliknya, tanpa pertumbuhan ekonomi, maka ekonomi akan mengalami stagnasi, sehingga negara tidak lagi mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi warga negaranya<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> A. B Susanto dkk, *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 102

Paradigma tradisional memiliki pandangan tentang pembangunan di Negara Sedang Berkembang (NSB) yang diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat dipecahkan dengan apa yang dikenal *trickle down effect* (merembas kebawah). Disini sebagai indikator berhasil atau tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional bruto (GNP) per kapita riil, dalam arti tingkat pertumbuhan GNP dalam harga konstan (setelah di deflasi dengan indeks harga) harus lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk<sup>9</sup>.

**Tabel 1.2**  
**PDRB Per kapita Menurut Kabupaten/ Kota**  
**Provinsi Banten**

<b>Kab/ Kota</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kab Lebak	18,61	20,73	22,62	24,75	26,77
Kab Pandenglang	18,20	20,28	22,19	24,38	26,47
Kab Serang	51,43	56,31	60,90	66,05	71,63
Kab Tangerang	91,69	102,04	109,34	119,29	130,17
Kota Serang	19,69	21,67	24,03	26,48	29,11
Kota Tangsel	50,21	56,04	61,37	68,32	75,23

Sumber: Badan Pusat Sttistik Provinsi Banten

---

<sup>9</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: alfabeta, 2012), h. 19

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Keuangan daerah tidak hanya berupa pendapatan, melainkan ada pengeluaran daerah yang rutin dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah didalam setiap kegiatan perekonomian terwujud dalam berbagai pembelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggaran pertahanan dan keamanan merupakan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh pemerintah.

Pendapatan daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi produktif daerah. Upaya untuk menaikkan pendapatan dapat dilakukan dengan mengembangkan dan mengoptimalkan potensi daerah dalam berbagai sektor. Demikian juga dengan belanja daerah atau pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian suatu daerah. Meskipun demikian peningkatan pengeluaran pemerintah belum tentu berakibat baik terhadap

aktivitas perekonomian. Oleh karena itu perlu dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut<sup>10</sup>.

Pendidikan berperan utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar<sup>11</sup>.

**Tabel 1.3**

**Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan**

<b>Kab/ Kota</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kab Lebak	43.304,8 3	46.231.15 0	7.806,73	26.62 1	17.58 0
Kab Pandenglan g	41.153,6 9	40.537.95 0	12.441,0 4	14.36 1	16.33 8
Kab Serang	50.576,9 7	42.567.35 0	7.328,34	14.73 1	18.67 2
Kab Tangerang	88.415,8 1	59.023.57 0	5.616,05	28.71 3	25.56

<sup>10</sup> Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro* (Yogyakarta: BPFE, 2000), h.

<sup>11</sup> Luh Dita Darmayanti, Surya Dewi Rustariyuni, *Pengaruh Pendapatan Per kapita, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap AHH Provinsi Bali*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No. 2 Juli 2019, h. 127



					8
Kota Serang	22.174,5 7	20.651.48 0	4.178,15	7.642	5.950
Kota Tangsel	23.202,2 7	24.475.91 0	2.815,27	10.00 0	2.862

Tabel 1.4

## Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Kesehatan

Kab/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Lebak	8.780,2 0	8.840.06 0	43.399,83	15.33 8	18.25 1
Kab Pandenglan g	9.315,7 5	9.932.20 0	69.163,33	27.35 4	23.83 7
Kab Serang	6.460,9 4	4.733.56 0	22.456,15	23.99 9	17.52 9
Kab Tangerang	5.534,1 5	5.140.36 0	14.807,8 7	47.82 8	14.71 7
Kota Serang	3.457,7 5	3.424.97 0	6.047,16	4.532	5.240
Kota Tangsel	6.475,4 5	3.480.05 0	15.650,86	27.17 0	14.54 3

IPM dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah<sup>13</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut. Provinsi Banten yang secara administratif terbagi menjadi beberapa bagian kabupaten/ kota diantaranya 4 kabupaten dan 4 kota, dengan banyaknya jumlah kabupaten/ kota, tentunya akan memberikan gambaran bagi peneliti mengenai pembangunan manusia yang bervariasi dalam satu provinsi. Begitupun dapat menjadi penting, berguna

---

<sup>12</sup> Kuncoro, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol 18 Februari 2016, h. 5

<sup>13</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Serang: Kopsyah Baraka, 2013), h. 175

dan bermanfaat untuk mendukung sekaligus memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Banten dan pembangunan nasional pada umumnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya tahun 2018 tentang pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2007-2016, berikut perbedaannya yang sekaligus menjadi kontribusi dalam penelitian ini.

a. Variabel

Penelitian terdahulu terdiri dari 2 variabel independen yaitu variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan 1 variabel yaitu pendapatan per kapita.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah di Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan pada penelitian ini adalah di Provinsi Banten menurut Kabupaten/ Kota.

c. Periode

Pada penelitian terdahulu periode yang digunakan dalam kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2007-2016. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2014-2018.

Dengan menjadikan variabel pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan dan indeks pembangunan manusia sebagai parameter penelitian. Dengan demikian, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PADA BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BANTEN”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Distribusi pengeluaran pemerintah untuk masyarakat belum optimal
2. Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan Provinsi Banten.
3. Penerimaan daerah belum optimal untuk lapangan pekerjaan

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yakni berupa potensi daerah yang belum dikelola dengan

baik dan pengeluaran yang tidak efisien, Pembatasan juga dilakukan pada periode data yakni mulai dari tahun 2014-2018 yang disajikan dalam bentuk data tahunan, akan tetapi untuk Kota Cilegon dan Kota Tangerang peneliti tidak mencantumkannya karena terdapat kekurangan data.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten?
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten?
4. Apakah pendapatan perkapita dan Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten

2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita dan Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Dengan adanya penulisan ini dapat memperluas dan memperkaya wawasan dalam teori maupun praktek. Kemudian untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi Akademik

Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan

memperkaya bahan kajian pustaka bagi peminat studi Ekonomi.

c. Bagi Pemerintah

Menambah wawasan bagi pemerintah mengenai keuangan daerah berupa belanja daerah dan pendapatan perkapita. Belanja daerah yang efisien dan pendapatan yang optimal akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## **G. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penelitian terdahulu, hipotesis serta sistematika penulisan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku yang berupa pengertian dan definisi

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data.

### **BAB I V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan.

## BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.